

## Analisis Tantangan Dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia Timur

\*Virdha Melinda Amalia<sup>1)</sup>, Lazuwardy 'Alam Qalby Warsito<sup>2)</sup>, Haidar Aziz<sup>3)</sup>

1)Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Indonesia; [virdha.melinda.amalia-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:virdha.melinda.amalia-2024@fisip.unair.ac.id)

2)Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Indonesia; [lazuwardy.alam.qalby-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:lazuwardy.alam.qalby-2024@fisip.unair.ac.id)

3)Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Indonesia; [haidar.aziz-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:haidar.aziz-2024@fisip.unair.ac.id)

### Abstrak

Tantangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur dan dampaknya terhadap layanan publik masih menjadi masalah signifikan. Meskipun *e-government* menjadi prioritas nasional, data menunjukkan indeks SPBE di Indonesia Timur lebih rendah (2.14) dibandingkan dengan Indonesia Barat (4.02) dan Tengah (3.53). Dengan pendekatan interpretatif, faktor penghambat seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran publik teridentifikasi sebagai tantangan utama. Akses internet terbatas, biaya tinggi, dan hambatan budaya menjadi kendala di daerah terpencil. Namun, beberapa inisiatif lokal menunjukkan potensi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, meskipun dihadapkan pada masalah komunikasi dan alokasi sumber daya. Rekomendasi mencakup peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan digital yang intensif, pemanfaatan program peningkatan infrastruktur digital, serta melaksanakan evaluasi internal mandiri secara berkala.

**Kata Kunci:** *e-government*; Indonesia Timur; infrastruktur digital; kesenjangan digital; SPBE.

### Abstract

*The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Eastern Indonesia and its impact on public services remain significant challenges. Although *e-government* is a national priority, data indicate that the SPBE index in Eastern Indonesia (2.14) lags behind Western (4.02) and Central Indonesia (3.53). Using an interpretative approach, this study identifies key barriers, including the digital divide, inadequate infrastructure, limited human resources, and low public awareness. In remote areas, restricted internet access, high costs, and cultural barriers further hinder implementation. Nonetheless, several local initiatives demonstrate potential for improving governance, despite persistent issues in communication and resource allocation. To address these challenges, the study recommends strengthening human resources through intensive digital training, leveraging national programs for digital infrastructure development, and conducting regular internal self-evaluations. These efforts are expected to enhance the effectiveness of SPBE in Eastern Indonesia and contribute to more equitable public service delivery.*

**Keywords:** Digital divide; digital infrastructure; *e-government*; Eastern Indonesia; SPBE.

### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi serta arus globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai

aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam ranah tata kelola pemerintahan. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses

mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melakukan transformasi digital. Pelayanan publik dianggap menjadi salah satu instrumen penting dalam melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama seperti dalam konsep *welfare state* (Pratama & Pramono, 2020). Salah satu manifestasi utama dari transformasi ini adalah adopsi dan implementasi *electronic government (e-government)*. Pemerintah wajib terus berusaha meningkatkan mutu pelayanannya karena memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Masyarakat dapat secara langsung mengevaluasi kinerja pemerintah melalui pengalaman mereka dalam menerima pelayanan yang telah diberikan. (Uyum et al., 2024).

Secara konseptual, *e-government* merujuk pada pemanfaatan teknologi oleh lembaga pemerintah-baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal, menyampaikan informasi dan layanan publik kepada masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pemerintah lainnya secara elektronik. Tujuannya tidak hanya terbatas pada modernisasi birokrasi, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, memperluas partisipasi publik, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga negaranya (*citizen engagement*). *E-Government* atau pemerintahan elektronik adalah bentuk inovasi pembangunan dalam tata kelola gedung dan infrastruktur pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan layanan publik demi kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan. (Rustandy et al., 2023)

Menurut Dr. Nag Yeon Lee dalam (Rubiyanto, 2019), terdapat delapan model utama *e-Government*, yaitu:

1. **Government to Citizen (G2C)** - layanan publik dan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara langsung dan satu arah. Di Indonesia Timur, G2C masih diterapkan secara *hybrid*, karena

keterbatasan infrastruktur seperti internet dan listrik di pedesaan.

2. **Citizen to Government (C2G)** - mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan informasi, masukan, atau berkomunikasi dengan pemerintah. Di Indonesia Timur, kanal untuk C2G seperti LAPOR!, SP4N telah tersedia, namun implementasi serta partisipasi masyarakat belum banyak dan merata.
3. **Government to Business (G2B)** - interaksi pemerintah dengan dunia usaha melalui transaksi elektronik, misalnya penyediaan informasi terkait kegiatan bisnis dan sistem *e-procurement*. Di Indonesia Timur, G2B belum optimal mendorong keterlibatan bisnis lokal, sehingga masih didominasi oleh perusahaan besar dari luar daerah.
4. **Business to Government (B2G)** - hubungan dari sektor bisnis ke pemerintah berupa pemasaran produk atau jasa untuk mendukung efisiensi birokrasi, pengelolaan data elektronik, dan penguatan proses bisnis. Sistem *e-procurement* menjadi contoh nyata interaksi G2B sekaligus B2G. Di Indonesia Timur, B2G masih belum berjalan efisien karena pemerintah daerah seringkali sulit memanfaatkan potensi teknologi dari pelaku usaha lokal.
5. **Government to Employee (G2E)** - berbagai inisiatif yang memfasilitasi komunikasi internal, manajemen pelayanan, dan hubungan kerja antara pemerintah dan pegawainya. Di Indonesia Timur, penerapan seperti absensi *online*, *e-office* serta e-SDM sudah diterapkan di beberapa pemda, namun masih belum merata. G2E hanya efektif di kota besar (seperti Makassar, Ambon, Kupang), sedangkan di daerah terpencil masih manual.
6. **Government to Government (G2G)** - pertukaran data dan komunikasi daring antar instansi atau lembaga pemerintah melalui sistem basis data terintegrasi, yang

bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Di Indonesia Timur, Integrasi data antar instansi masih lemah karena tidak semua pemda memiliki infrastruktur *server* atau jaringan *data center*, sehingga koordinasi lintas lembaga belum lancar.

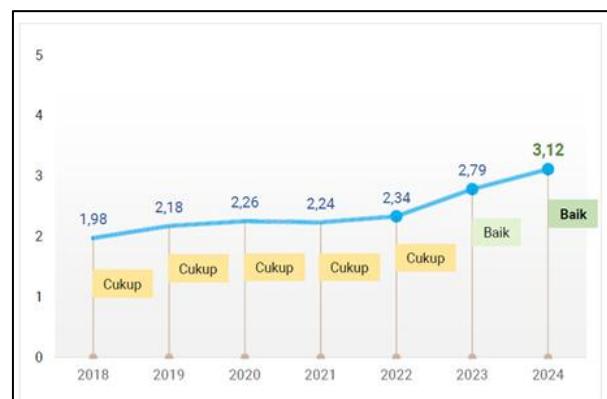
7. **Government to Non-Profit Organization (G2N)** - penyediaan informasi oleh pemerintah untuk organisasi nirlaba, partai politik, maupun organisasi sosial. Di Indonesia Timur, Pemerintah sudah menyediakan informasi kebijakan pembangunan melalui portal resmi, tapi organisasi masyarakat sipil dan NGO di Indonesia Timur sering kesulitan mengakses atau menggunakan secara optimal.
8. **Non-Profit Organization to Government (N2G)** - alur sebaliknya, yakni komunikasi dan pertukaran informasi dari organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial kepada pemerintah. Di Indonesia Timur, Beberapa LSM, komunitas adat, dan organisasi lokal sudah mulai menyampaikan data atau laporan digital kepada pemerintah, namun keterbatasan jaringan dan kapasitas SDM membuat arus komunikasi masih dominan manual.

*E-government* menjadi sarana untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Melalui penerapan ini, kolaborasi antarinstansi dalam melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan dapat semakin efektif guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, *e-government* berperan dalam meningkatkan kualitas serta jangkauan layanan publik bagi masyarakat secara luas, sekaligus meminimalisasi praktik penyalahgunaan kewenangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan dukungan sistem pengawasan serta mekanisme pengaduan masyarakat berbasis teknologi elektronik. (Marten Doni Ratu et al., n.d.). Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *e-government* adalah kegiatan yang

dilakukan dengan menggunakan teknologi, informasi serta komunikasi oleh pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta transparansi pemerintah itu sendiri.

Kegagalan pemerintah disebabkan oleh pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan penyalahgunaan wewenang aparatur, sifat sentralistik, pola *top-down*, orientasi kepentingan pribadi, praktik monopoli, serta kinerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, sikap represif dan ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat turut memperkuat suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Faktor-faktor ini pada akhirnya membentuk pola hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

Di Indonesia, pengembangan *e-government* telah menjadi salah satu prioritas nasional, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, pemerintahan digital menjadi suatu elemen penting dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia yang transparan, efisien, dan inklusif. Transformasi digital nasional berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, memperkuat infrastruktur digital, serta meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital.



**Gambar 1. Capaian Indeks SPBE Nasional 2018-2024**

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPBE Tahun 2024

Sebagai bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita menekankan

pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan. Program-program utama dalam Asta Cita mencakup pengembangan *smart government* untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pembangunan sistem keamanan digital yang terpadu, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital. Momentum pertumbuhan digital Indonesia semakin terlihat dengan lonjakan 43 peringkat sejak 2016, yang kini menempatkan negara dalam kategori *Very High EGDI*. Untuk menjaga tren positif ini, sinergi antara regulasi yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus diperkuat (Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024, n.d.).

Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 untuk memastikan integrasi dokumen elektronik dan sistem manajemen dan pengolahan informasi dalam pengembangan layanan publik yang transparan, serta disahkannya pula Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu UU No.11 tahun 2008 juga merupakan dukungan untuk penyelenggaraan *electronic government* dan (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , 2018). Kedua peraturan ini mengatur prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, integrasi layanan digital antar instansi, serta mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui proses transformasi ini, pemerintah daerah otonom dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menghapuskan hambatan dalam organisasi dan birokrasi, serta membangun jaringan manajemen dan mekanisme kerja yang terintegrasi sehingga memungkinkan antarinstansi pemerintah bekerja sama secara terpadu dalam mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan layanan publik.

Penyelenggaraan SPBE di Indonesia memiliki hasil yang beragam, beberapa daerah berhasil mengimplementasikan SPBE dengan baik namun tidak sedikit pula daerah yang belum berhasil dalam pelaksanaan SPBE. Berdasarkan penelitian

sebelumnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan program-program dalam agenda reformasi birokrasi. Adanya dasar kepemimpinan yang kuat serta visioner dapat semakin mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Taufik et al., 2023). Layanan digital yang disediakan oleh berbagai dinas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah, mengurangi hambatan geografis, dan mempercepat proses layanan administrasi. (Vera Juniyengsi, 2024). Selain itu, memberikan kontribusi terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan (Yanto & Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, 2025). Komitmen dari pemerintah daerah, termasuk bupati, wakil bupati, dan pejabat lainnya, sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Yumame & Gainau, 2025).

Namun di beberapa daerah lain, implementasi SPBE masih menghadapi hambatan dan belum terlaksana dengan optimal. Penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia perlu menjadi prioritas agar seluruh domain SPBE dapat berkembang secara merata (Syafa'at et al., 2025). Pelaksanaan SPBE belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kepemimpinan dalam pelaksanaan SPBE sudah terlihat dengan jelas yang dibuktikan dijadikan SPBE ini sebagai indikator kinerja pemerintah; Kerjasama Dari Para Birokrat, sudah terbentuk tim koordinasi SPBE tetapi tim ini belum aktif. Anggaran dalam pelaksanaan SPBE masih terbatas sehingga pembiayaan dalam pelaksanaan SPBE belum bisa dilakukan secara menyeluruh (Febrian Arga Wahyudi & Nora Eka Putri, 2024). Hasil analisis tingkat kematangan SPBE di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan adanya empat aspek implementasi analisis kesenjangan pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Analisis ini didasarkan pada identifikasi

kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE, tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat kematangan (Dwitawati, n.d.).

Secara umum, *e-government* bukan hanya berbicara mengenai penggunaan teknologi informasi saja, tetapi juga terdapat sistem sosial didalamnya seperti isu-isu sosial di masyarakat. *E-Government* kini menjadi fenomena global yang mendapat perhatian luas dari pemerintah, politisi, pembuat kebijakan, sektor bisnis, masyarakat, hingga kalangan akademisi lintas disiplin. Kompleksitas pengembangan sistem *e-Government* muncul karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan, yang tidak dapat dipisahkan melainkan harus dikelola secara terpadu dengan interaksi yang saling berkaitan.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE pada instansi pemerintahan, ditemukan implementasi *e-government* beberapa bagian daerah masih belum maksimal dalam. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan penyelenggaraan SPBE ini, dimulai dari isu kesenjangan digital yang membatasi akses bagi sebagian kelompok masyarakat, kesiapan sumber daya manusia (Aparatur Sipil Negara), resistensi terhadap perubahan budaya kerja birokrasi, sistem antar lembaga, kerangka regulasi yang adaptif serta faktor demografis juga menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan *e-government* (Kennedy *et al.*, 2024; La Adu *et al.*, 2022).

Meskipun penerapan *e-government* semakin meluas di Indonesia, kesenjangan implementasi SPBE antara daerah tetap menjadi masalah yang signifikan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditemukan bahwa indeks SPBE di Indonesia Timur rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, yang menunjukkan adanya

kesenjangan yang perlu ditangani untuk mencapai kesetaraan dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi SPBE di wilayah Indonesia Timur masih sangat terbatas, terutama kurangnya fokus pada tantangan spesifik dalam implementasi di wilayah ini. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi akademis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual, mengingat kondisi geografis dan kelembagaan serta sumber daya manusia yang berbeda dibanding wilayah lain. Meskipun ada kemajuan nasional, kesenjangan implementasi antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur masih sangat jelas terlihat (Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat, n.d.). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang dapat mempengaruhi implementasi SPBE di Indonesia Timur, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dengan mengisi kekosongan literatur tersebut dan memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi SPBE di wilayah Indonesia Timur, sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Dengan memfokuskan pada kesenjangan digital yang ada, penelitian ini akan memberikan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang menghambat penerapan *e-government* di wilayah ini, serta solusi yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut demi tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan beberapa komponen penting yang harus diperhatikan agar dalam penerapannya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Indrajit dalam (Yasmin, 2025) , beberapa komponen penting tersebut antara lain:

**1. Pengembangan Konten (*Content Development*)**

Meliputi pembangunan aplikasi, pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi basis data, hingga kesepakatan desain antarmuka pengguna.

**2. Penguatan Kompetensi SDM (*Competency Building/Human Resources*)**

Mencakup rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan keahlian sumber daya manusia di seluruh lini pemerintahan.

**3. Konektivitas (*Connectivity*)**

Berkaitan dengan tersedianya infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di wilayah penerapan *e-Government*.

**4. Hukum Siber (*Cyber Laws*)**

Menekankan pentingnya perangkat hukum yang mengatur berbagai aktivitas terkait *e-Government*.

**5. Antarmuka Warga (*Citizen Interfaces*)**

Meliputi penyediaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (*multi-access channels*) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pemangku kepentingan kapan pun dan di mana pun.

**6. Permodalan (*Capital*)**

Berkaitan dengan skema pembiayaan proyek *e-Government*, khususnya kebutuhan dana pasca implementasi untuk pemeliharaan, pengembangan, serta perumusan model pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah.

Berdasarkan penelitian milik (Ndou, 2017), faktor yang paling penting dan krusial dalam kesuksesan penerapan *e-government* adalah:

1. Infrastruktur teknologi, merupakan fondasi utama keberhasilan.
2. Komitmen pemerintah, meliputi dukungan politik serta kebijakan.
3. Partisipasi masyarakat, adanya keterlibatan pengguna layanan.
4. Sumber Daya Manusia, yakni pegawai yang kompeten dalam mengelola sistem.

Secara global, (United Nations, 2025) memiliki aspek penilaian dalam menilai kematangan sebuah *e-government* yang dinamakan *E-Government Development Index* (EGDI). Aspek tersebut adalah

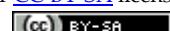
1. Kualitas layanan digital (*Online Service Index, OSI*)
2. Infrastruktur internet dan teknologi (*Telecommunication Infrastructure Index, TII*)
3. Literasi digital dan kapasitas masyarakat (*Human Capital Index, HCI*).

Inisiatif *e-government* terbaik melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya mandat dari atas ke bawah, serta kesadaran akan masalah, budaya, dan institusi local, namun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adopsi *e-government* di beberapa negara Asia antara lain: tingkat penetrasi internet yang rendah, kemiskinan yang meluas, buta huruf, pendanaan yang tidak mencukupi, korupsi, kurangnya pasokan listrik yang dapat diandalkan, kurangnya tenaga terampil, rendahnya tingkat melek komputer, dan peran gender yang terbatas (Warf, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dimana penulis berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di saat sekarang serta berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Menurut (Haryoko et al., 2020) dalam pandangan interpretatif, individu berusaha untuk memahami dunianya, baik terkait lingkungan kehidupan sosial maupun dalam lingkungan kerjanya. Individu-individu itu akan mengembangkan makna secara subjektif-personal.

Pemilihan metode kualitatif interpretatif dalam tulisan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam kompleksitas fenomena yang tidak sekadar bersifat teknis,



melainkan juga sosial, organisasional, dan politis. Implementasi *e-government* melibatkan interaksi sosial, perubahan budaya kerja, adaptasi kebijakan, serta persepsi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (seperti aparatur pemerintah, warga negara, dan pihak terkait lainnya). Pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif, interpretasi, dan pemahaman para aktor ini terhadap proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan.

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi literatur atas dokumen dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan implementasi *e-government*. Menurut Zed (dalam (Melfianora & Si, n.d.), studi literatur tidak hanya berperan sebagai tahap awal dalam penyusunan kerangka penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai sumber literatur yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Terdapat dua sumber data yang menjadi acuan penulisan, yaitu data primer yang didapatkan melalui Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Peraturan serta laporan resmi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE. Data sekunder yang digunakan penulis yaitu tulisan ilmiah atau penelitian sebelumnya tentang penyelenggaraan implementasi SPBE di berbagai daerah di Indonesia, serta berbagai artikel jurnal terkait *e-government* yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta dasar penulis dalam melaksanakan penelitian terkait penyelemgaraan *e-government* yang dalam hal ini SPBE di Indonesia Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan laporan SPBE Nasional Tahun 2022-2024 hal ini digunakan untuk memastikan validitas data yang ditampilkan serta melihat keterbaharuan permasalahan yang sedang diteliti. Referensi lainnya seperti tulisan ilmiah dipilih penulis dengan rentan waktu tidak lebih dari sepuluh tahun terakhir agar data yang digunakan tetap saling berhubungan dan layak dalam penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis interpretatif memungkinkan

peneliti untuk "masuk" ke dalam dunia para aktor ini, menggali makna subjektif yang mereka lekatkan pada SPBE, melalui teknik seperti analisis dokumen yang mendalam dan kontekstual (seperti yang dilakukan dalam jurnal ini), mampu menangkap dinamika proses yang kompleks, serta faktor-faktor kontekstual unik di setiap daerah yang seringkali luput dari pengukuran kuantitatif.

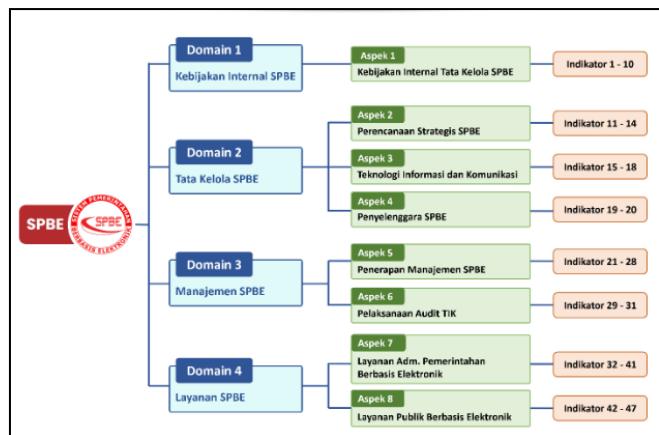
Dengan demikian, pendekatan kualitatif interpretatif sangat sesuai untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai bagaimana *e-government* diimplementasikan dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kesenjangan di Indonesia Timur untuk dianalisis komprehensif dalam sebuah publikasi ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tantangan dan Implementasi SPBE di Indonesia Timur

Berdasarkan data indeks implementasi SPBE, wilayah Indonesia Timur masih tergolong rendah, dengan rata-rata 2,14 pada tahun 2024, dibandingkan dengan Indonesia Barat (4.02) dan Indonesia Tengah (3.53) (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024). Hal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi wilayah-wilayah tersebut dalam adopsi *e-government* secara efektif. Meskipun terdapat kemajuan nasional, kesenjangan implementasi antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur masih sangat jelas terlihat, terutama terkait dengan infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia, dan aksesibilitas layanan digital di daerah yang lebih terpencil.

Secara lebih rinci, indeks penilaian SPBE Nasional terdiri dari beberapa domain, aspek dan indikator seperti dibawah ini.

**Gambar 2. Indeks Penilaian SPBE Nasional**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024

Untuk menggambarkan lebih jelas tingkat kepuasan dan hasil implementasi SPBE di berbagai daerah, berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan kepuasan dari setiap wilayah berdasarkan indeks SPBE yang telah dinilai pada tahun 2022- 2024, chart ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai sebaran penilaian kepuasan yang berbeda antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Berdasarkan gambar diatas, hasil indeks SPBE khusus di Kawasan Indonesia Timur per Domain (D) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Capaian Indeks SPBE Wilayah Indonesia Timur 2024**

Nama Provinsi (Kawasan Indonesia Timur)	D1	D2	D3	D4	Indeks SPBE	Predikat
Sulawesi Utara	4,60	2,40	1,55	3,42	3,01	Baik
Gorontalo	5,00	4,00	3,09	4,33	4,13	Sangat baik
Sulawesi Tengah	3,40	2,60	1,36	3,49	2,91	Baik
Sulawesi Selatan	4,00	3,60	3,00	4,45	3,94	Sangat baik
Sulawesi Tenggara	3,00	2,20	1,00	3,88	2,87	Baik
Sulawesi Barat	4,70	3,40	2,18	4,14	3,70	Sangat baik
Bali	4,80	4,00	3,64	4,57	4,30	Memuaskan
Nusa Tenggara Barat	3,10	3,20	2,91	4,13	3,56	Sangat baik

Nusa Tenggara Timur	4,70	3,20	3,09	4,33	3,89	Sangat Baik
Maluku	2,50	2,20	1,00	3,50	2,63	Baik
Maluku Utara	3,00	2,10	1,64	3,30	2,69	Baik
Papua	1,50	1,30	1,00	2,95	2,03	Cukup
Papua Barat	2,40	1,70	1,00	3,03	2,28	Cukup
Papua Selatan	1,00	1,00	1,00	2,33	1,61	Kurang
Papua Tengah	1,00	1,10	1,00	2,88	1,88	Cukup
Papua Pegunungan	1,00	1,50	1,00	2,09	1,62	Kurang
Papua Barat Daya	3,00	1,10	1,00	3,43	2,39	Cukup
<b>Rata-Rata</b>	<b>3,10</b> (Bai k)	<b>2,38</b> (Cuku p)	<b>3,38</b> (Bai k)	<b>3,54</b> (Sang at Baik)	<b>2,90</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024

Jika melihat dari data table diatas, rata-rata Indeks SPBE KTI dapat dikatakan Baik. Namun jika kita melihat pada nilai per domain SPBE di KTI, masih terdapat satu domain yang berpredikat Cukup, yakni domain tata kelola SPBE yang meliputi aspek Perencanaan Strategis SPBE, TIK, serta Penyelenggara SPBE, dan sisanya dapat dikatakan baik dan sangat baik. Meskipun demikian, jika kita melihat lebih detail satu per satu provinsi dalam KTI tersebut, secara garis besar, indeks SPBE di daerah papua masih banyak yang rendah yang artinya bahwa di daerah tersebut banyak yang kurang optimal dalam penerapan SPBE. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, maka bagian Provinsi Papua perlu perhatian khusus utamanya dalam domain tata kelola seperti penyelenggaraan infrastruktur digital disana. Dengan adanya indeks tersebut artinya semakin menunjukkan tingginya disparitas kesenjangan digital yang dialami oleh Provinsi Papua dengan provinsi lain di Indonesia Timur.

Berdasarkan penelitian oleh (Tawaris & Wardiyanto, 2025) disarankan bahwa pengembangan kolaborasi lintas sektor dan pendidikan digital harus menjadi bagian dari upaya

untuk mempercepat adopsi teknologi di daerah-daerah tertinggal. Hal ini sangat relevan dengan kesenjangan digital yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE di wilayah Indonesia Timur, kesenjangan ini tidak hanya terkait akses internet, tetapi juga mencakup kualitas akses, keterjangkauan biaya, dan kemampuan digital masyarakat dan dapat dikatakan kesenjangan ini secara efektif membatasi akses terhadap layanan digital bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, menciptakan warga negara kelas dua dalam hal pelayanan publik digital.

Selain itu, penelitian oleh (Wahyu Sulistya et al., 2019) menunjukkan bahwa meskipun *e-government* di Indonesia mengalami kemajuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih ada banyak daerah yang tertinggal dalam hal adopsi teknologi, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan digital menjadi faktor utama dan dominan yang mempengaruhi rendahnya indeks SPBE di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan hasil analisis faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi SPBE di daerah yaitu dibutuhkannya SDM yang kompeten, baik di sisi teknis (pengelola sistem, keamanan siber) maupun manajerial (perencanaan, manajemen proyek TI, analisis data), namun kenyataannya, masih banyak ditemukan rendahnya sumber daya manusia (ASN) dengan kualifikasi yang memadai tersebut. Selain itu, tingkat literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, masih rendah tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga di kalangan ASN sendiri, selain itu kurangnya program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan memperparah kondisi ini. Dari beragam permasalahan dalam penerapan SPBE diatas, problem yang paling utama dan dominan adalah mengenai infrastruktur digitalnya, hal tersebut semakin diperburuk dengan aspek seperti SDM yang kurang kompeten, manajerial dan kepemimpinan yang kurang mendukung, serta literasi digital dari masyarakat itu sendiri yang

semakin memperburuk indeks SPBE di kawasan Indonesia Timur, utamanya pada Provinsi Papua.

Meskipun terdapat tantangan dalam penyelenggarannya, salah satu daerah di wilayah Indonesia Timur telah menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan SPBE, dimana dapat disimpulkan *e-government* dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi contoh atas keberhasilan penerapan SPBE dengan mendapatkan predikat "sangat baik" dalam pelaksanaan evaluasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Polewali Mandar sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan SPBE yaitu dengan menerapkan *Collaborative Governance* yang dimana melibatkan *stakeholders* lainnya, sebab dalam mendukung penerapan SPBE diperlukan penetapan dokumen kebijakan seperti proses bisnis, manajemen SPBE, audit TIK, analisis resiko TIK dan sebagainya. Keterlibatan lintas perangkat daerah ini pun ditentukan berdasarkan peran setiap dinas terkait yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan SPBE.

Keberhasilan ini juga sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan daerah dalam penyelenggaraan SPBE. Berbagai upaya optimalisasi SPBE didukung oleh Kepala Daerah diantaranya menjadikan SPBE sebagai salah satu program dalam mendukung visi dan misi serta menetapkan Indeks SPBE sebagai indikator kinerja utama dalam RPJMD, menjembatani proses kolaborasi antar instansi serta mendukung penuh dengan membuat kebijakan yang mengatur pelaksanaan SPBE di daerah. Hal ini juga didukung dengan diterapkannya budaya *continuous improvement* yang dimana kebijakan serta program yang telah ditetapkan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan SPBE di daerah (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun tantangan terkait *digital divide* dan infrastruktur masih sangat nyata, beberapa daerah telah menunjukkan bahwa

dengan pembinaan yang tepat, pelatihan, serta strategi kolaboratif, SPBE dapat membawa perubahan positif dalam kualitas pelayanan publik di Indonesia Timur. Oleh karena itu, untuk mempercepat adopsi *e-government* di wilayah yang tertinggal, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas digital, serta memperkuat kerjasama lintas sektor untuk menciptakan keberlanjutan dalam penerapan SPBE.

### Analisis Komponen Implementasi SPBE di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan pada data serta penelitian terdahulu, hasil analisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dengan komponen penting menurut Indrajit dalam (Yasmin, 2025) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Analisis Penerapan SPBE di Kawasan Indonesia Timur**

Penelitian Terdahulu	Status Penerapan	Komponen	Indeks Domain SPBE
1. Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Konawe Selatan (2023)	Baik	<i>Competency Building/ Human Resource, Cyber Laws, Capital, Content Development, and Ment.</i>	D1-D4
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (2022)	Kurang Baik	<i>Human Resource, Paradigm, Citizen Interface, Content Development, and Ment.</i>	D2, D3

3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Daerah: Studi Kasus Disdukcapil Kab. Donggala (2025)	Cukup Baik	<i>Content Development, Human Resource.</i>	D2, D3
4. Implementasi Gap Analisis Dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Kabupaten Bener Meriah (2022)	Kurang Baik	<i>Content Development, Compete ncy Building / Human Resource s, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface s, Capital.</i>	D1-D4
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN LANNY JAYA (2025)	Kurang Baik	<i>Competency Building/ Human Resource, Content Development, and Ment.</i>	D2-D4
6. Implementasi Sistem	Kurang Baik	<i>Connectivity, Content</i>	D2,D3



Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung (2025)	Develop ment, Capital.
7. Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang (2024)	Cukup Baik <i>Connectivity, Citizen Interface</i> D2, D4
8. Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2025)	Kurang Baik <i>Competency Building / Human Resource</i> , <i>Connectivity</i> .
9. Analisis Kesiapan E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kota Sorong (2025)	Cukup Baik <i>Cyber Laws</i> D1
10. Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan	Kurang Baik <i>Connectivity, Human</i> D2-D4

dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia (2024)

Sumber : Diolah oleh Penulis

Jika melihat tabel analisis dari aspek komponen milik Indrajit, rata-rata penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kawasan Indonesia Timur (KTI) masih dapat dikatakan kurang optimal diterapkan, meskipun di beberapa tempat sudah cukup baik, hanya saja terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki. Sebagian besar kekurangan atau kendala dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kawasan Indonesia Timur (KTI) tersebut ialah pada komponen *Content Development, Human Resources/Competency Building, Connectivity, Citizen Interfaces* dan *Paradigm*. Jika diterjemahkan pada indeks per domain SPBE Nasional, rata-rata kekurangannya ialah terletak pada Domain 2 dan Domain 3, yakni Domain Tata Kelola SPBE yang meliputi aspek Perencanaan Strategis SPBE, TIK, serta Penyelenggara SPBE dan Domain Manajemen SPBE yang meliputi aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK.

Kesenjangan digital menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya indeks SPBE di wilayah Indonesia Timur. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi infrastruktur TIK yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di daerah-daerah tersebut (Rachmawati et al., 2022). Di samping itu, kendala geografis, seperti keterbatasan akses internet di daerah-daerah terpencil dan biaya tinggi yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur digital, juga memperburuk ketimpangan ini (Kencono et al., 2024). Faktor lainnya yang mempengaruhi

implementasi SPBE di daerah yaitu dibutuhkannya SDM yang kompeten, baik di sisi teknis (pengelola sistem, keamanan siber) maupun manajerial (perencanaan, manajemen proyek TI, analisis data), serta dari aspek politik seperti pemerintah, aspek sosial masyarakat, serta aspek kelembagaan seperti kepemimpinan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menunjang terlaksananya implementasi *e-government* di daerah, sebagai berikut :

## 1. Pemerintah Pusat

- a) Menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai peraturan terkait *e-government* (termasuk SPBE - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di tingkat pusat agar tidak tumpang tindih dan memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah daerah.
- b) Mendorong dan mewajibkan penerapan standar data, standar teknis, dan arsitektur SPBE nasional untuk memastikan sistem antar-Pemda dan antara Pemda-Pusat dapat saling terhubung dan mendorong transparansi dan partisipasi publik.
- c) Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur digital nasional dan *platform cloud* pemerintah yang aman (seperti Palapa Ring dan akses internet broadband).
- d) Mengoperasionalkan dan memastikan PDN (Pusat Data Nasional) dapat diakses oleh Pemda dengan skema yang efisien dan terjangkau untuk mengurangi beban Pemda dalam membangun dan mengelola pusat data sendiri.
- e) Mengembangkan dan menyelenggarakan program pelatihan teknis bagi ASN di daerah, mencakup literasi digital, manajemen proyek TI, keamanan siber, dan analisis data serta membangun platform atau forum nasional untuk berbagi pengetahuan, praktik terbaik (*best practices*), dan solusi antar-Pemda dalam implementasi *e-government*.

## 2. Pemerintah Daerah

- a) Memperkuat komitmen pimpinan dan tata kelola internal dari Kepala Daerah serta membentuk Tim Koordinasi SPBE untuk mengawal perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE serta memastikan Rencana Induk SPBE Daerah selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b) Menyusun arsitektur SPBE daerah yang jelas dan terukur yang berfokus pada kebutuhan layanan prioritas masyarakat.
- c) Menyelenggarakan pelatihan secara rutin bagi ASN, baik teknis (pengelola sistem, keamanan) maupun non-teknis (literasi digital, pemanfaatan aplikasi, manajemen perubahan), serta menjalin kemitraan strategis dengan akademisi (untuk riset dan kajian), komunitas/masyarakat sipil (untuk masukan dan sosialisasi), dan sektor swasta (untuk teknologi atau sumber daya).
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara mandiri terhadap progres implementasi SPBE dan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat dan ASN, serta mengukur dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik.

## PENUTUP

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Kencono et al., 2024) . Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur menghadapi serangkaian tantangan unik yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan keberhasilan SPBE di berbagai wilayah tidak lepas

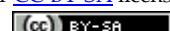
dari konteks sosial-budaya, geografis, dan sumber daya manusia setempat

Terdapat beberapa faktor internal serta eksternal yang ikut mempengaruhi terjadinya kesenjangan dalam penyelenggaraan SPBE. Rendahnya kesiapan sumber daya manusia (Aparatur Sipil Negara) yang memumpuni serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja birokrasi dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penghambat yang paling mempengaruhi penyelenggaraan SPBE, faktor eksternal seperti infrastruktur yang belum memadai serta kondisi demografis juga menjadi aspek yang ikut serta dalam menentukan keberhasilan SPBE, sehingga diperlukan adanya suatu evaluasi, reformasi, perbaikan infrastruktur, kolaborasi antar *stakeholder* hingga pada *capacity building* agar penerapan SPBE utamanya di Indonesia Timur dapat teroptimalkan.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah untuk memprioritaskan penyelenggaraan SPBE di daerah dapat didukung dengan memberikan pelatihan digital intensif bagi ASN serta meningkatkan infrastruktur teknologi informasi salah satunya dengan memanfaatkan program *Palapa Ring* serta memaksimalkan pelaksanaan evaluasi mandiri pelaksanaan SPBE dengan mengikutsertakan pihak luar seperti akademisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang optimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

## REFERENSI

- Dwitawati, I. (n.d.). IMPLEMENTASI GAP ANALISIS DARI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KABUPATEN BENER MERIAH. *JINTECH: Journal of Information Technology*, 3(1). <https://journal.araniry.ac.id/index.php/jintech>
- Febrian Arga Wahyudi, & Nora Eka Putri. (2024). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi Fajar. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498-1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 134-147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- La Adu, arifin, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH DAERAH. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215-223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024. (n.d.).
- Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat. (n.d.).
- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52-74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Marten Doni Ratu, L., Wira Wacana Sumba, K., Komunikasi dan Informatika, D., & Sumba Timur, K. (n.d.). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Electronic-Based Government System in the Regional Government of East Sumba Regency)* (Vol. 01).
- Melfianora, I., & Si, M. (n.d.). *PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DENGAN STUDI LITERATUR*.



- <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/pelitian-kepustakaan.html>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Ndou, V. (2017). E-government for developing countries: Opportunities and challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18, 1–24.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , Pub. L. No. 95 (2018).
- Pratama, M. R., & Pramono, T. (2020). Pelayanan Publik Di Daerah: Menguak Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Era Otonomi Daerah Local Public Service: Uncovering Basic Public Service Disparity in Regional Autonomy Era. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.670>
- Rachmawati, R., Anjani, D. F., Rohmah, A. A., Nurwidiani, T., & Almasari, H. (2022). Electronically-based governance system for public services: implementation in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Human Geographies*, 16(1), 71–86. <https://doi.org/10.5719/hgeo.2022.1615>
- Rubyanto. (2019). Implementasi Kebijakan E-Government pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara (MEDIASOSIAN)*, 2(1), 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.205>
- Rustandy, V. C. F., Kamariyah, S., Sholichah, N., & Pramudiana, I. D. (2023). Penerapan Kualitas Pelayanan Sirkel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara (MEDIASOSIAN)*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4537>
- Syafa'at, F., Azhar, R., Aminah, S., Zakiyah, F., Informasi, S., Tadulako, U., & Artikel, S. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Daerah: Studi Kasus Disdukcapil Kab. Donggala INFO ARTIKEL. 4(1Juni), 384–391. <https://doi.org/10.70247/jumistik.v4i1.142>
- Taufik, Liwaul, & Sartono. (2023). ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KONawe SELATAN. *Journal Publicuho*, 6(2), 507–524. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134>
- Tawaris, R., & Wardiyanto, B. (2025). Innovation Analysis of Government Shopping Integration Platform through Digipay: Empowering MSMEs and Being Proud of Indonesian Products in the New Public Governance perspective. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.28926/briliant.v10i1.2103>
- United Nations. (2025). *E-Government Development Index (EGDI)*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index>
- Uyum, L. L., Sholichah, N., Pramudiana, I. D., Kamariyah, S., & Fatah, Z. (2024). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SEPEKAN (SISTEM INFORMASI REKOMENDASI PERIZINAN LAYANAN KELITBANGAN DENGAN DIGITAL SIGNATURE) DI BAPPEDA KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 8(2), 244–265. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v8i2.5984>
- Vera Juniyengsi. (2024). Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sindereng

- Rappang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 130–154.  
<https://doi.org/10.70214/vgpab18>
- Wahyu Sulisty, A. Q., Bastian Sulistiyo, B., Aditya, F., Aritonang, I. D., Amos Simangunsong, S., Shihab, M. R., & Ranti, B. (2019). A Case Study of Indonesian Government Digital Transformation: Improving Public Service Quality through E-government Implementation. *2019 5th International Conference on Science and Technology (ICST)*, 1–6.  
<https://doi.org/10.1109/ICST47872.2019.9166234>
- Warf, Barney. (2017). *E-Government in Asia: origins, politics, impacts, geographies*. Chandos Publishing is an imprint of Elsevier.
- Yanto, F., & Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, M. (2025). YUME: Journal of Management Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. In *YUME: Journal of Management* (Vol. 8, Issue 1).
- Yasmin, M. (2025). *PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA PEGAWAI DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT-BASED GOVERNMENT SYSTEM IN IMPROVING EMPLOYEE WORK EFFICIENCY AT THE POLEWALI MANDAR REGENCY REGIONAL SECRETARIAT OFFICE [UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR]*.  
[https://lib.unm.ac.id/storage/file\\_thesis/Lm4KqUIA0BQ9Sq6pDWeLvE5M0xL0bqfLO7FDAZwU.pdf](https://lib.unm.ac.id/storage/file_thesis/Lm4KqUIA0BQ9Sq6pDWeLvE5M0xL0bqfLO7FDAZwU.pdf)
- Yumame, J., & Gainau, A. W. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN LANNY JAYA*. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3).  
<https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2098>